

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA RAWANG OGUANG
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi pada Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

**NAMA : MIRANDA MEIRA YOLA
NPM : 220411048**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

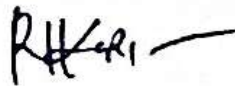
PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada
Hari : Rabu
Tanggal : 29
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

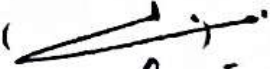


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

1. Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Aaggota penguji I) ()
3. RISVANSI, S.Pd.I., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M.S Sos, M.Si
NIDN. 1012038701

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA
RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN
HILIR SEBERANG
NAMA : MIRANDA MEIRA YOLA
NPM : 220411048
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



SARJAN, M.S.Sos., M.Si
NIDN. 1012038701

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901
KETUA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : MIRANDA MEIRA YOLA

NPM : 220411048

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 15 April 2026



MIRANDA MEIRA YOLA

NPM. 220411048

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang penting, karena Allah telah mempersiapkan hal yang baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit

” Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Miranda Meira Yola)

”Orang dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin..

Pertama tama saya mengucapkan puji syukur kepada allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-nya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku Ayahku Sudirmanto dan Ibuku Darmilis, yang selalu memberikanku semangat dan selalu mendoakan putrimu dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk Ayah dan Ibuku pengorbananmu sungguh luar biasa. Serta kakakku Nuryeti Delita dan abangku Okris Naldi Putra dan adikku Jendri Jun yang selalu memberikan doa dan dukungan. dan saya juga berterima kasih buat keluarga besar saya yang sudah banyak mendukung serta menjadi penyemangat buat saya.

Untuk diri sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini.terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini akan menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. Dan skripsi ini bukti perjuangan nyata yang patut dibanggakan.

Dan saya mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada support sistem terbaik saya, Ahmad Nur Fauzan. Terima ksih karena sudah selalu sabar menemani setiap proses yang saya lalui, selalu hadir memberikan dukungan. Terima ksih sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan ini. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini, kelak akan menjadi cerita yang selalu kita banggakan bersama.

Untuk Teman-Temanku Afdelia Salina Rusdi, Julika Deyanti, Rivi Kania, Wahyu Aira Lestari, Mifta Huljanna, yang selalu menemani dan sama-sama berjuang dalam perjuangan pendidikan untuk meraih gelar sarjana terima kasih untuk semuanya.

Universias islam kuantan singingi, almamater yang telah menjadi tempat saya belajar, berkembang, dan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Terima kasih atas pengalaman, ilmu, dan kesempatan yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirabbil'alamin.

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Skripsi ini yang berjudul “ *Analisi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang*”. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Meskipun penulis berharap isi dari proposal penelitian ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada kekurangan dan kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar proposal dapat lebih baik lagi.

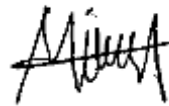
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak- pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan proposal ini yang mana diantaranya kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd,I.M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan,M,S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Alshar Andri,S.Sos.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak **Desriadi,S.Sos.,M.Si** selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Sarjan,M,S.Sos.,M.Si** selaku dekan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar untuk membimbing penulis demi tercapainya penyelesaian skripsi ini serta memberikan banyak saran yang berharga bagi penulis.

6. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta doa yang tiada henti kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa studi dan penyusunan skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Teluk Kuantan, 5 September 2025



Miranda Meira Yola
220411048

DAFTAR ISI	HALAMAN
PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori/ Konsep Administrasi Negara	8
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik	14
2.1.3 Teori Pemerintahan Desa.....	19
2.1.4 Teori Sumber Daya Manusia (SDM)	22
2.1.5 Teori/ Konsep Partisipasi Masyarakat	24
2.1.6 Teori Masyarakat dan Desa	33
2.1.7 Teori/ Konsep Pembangunan	36

2.2 Kerangka Pemikiran	41
2.3 Hipotesis	42
2.4 Defenisi Operasional	42
2.4.1 Perencanaan	43
2.4.2 pelaksanaan.....	43
2.4.3 pengawasan.....	43
2.4.4 evaluasi	43
2.5 Operasional Variabel	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Informasi Penelitian	45
3.3 Sumber Data	46
3.3.1 Data Primer.....	46
3.3.2 Data Sekunder	47
3.4 Fokus Penelitian.....	47
3.5 Lokasi Penelitian	47
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.6.1 Observasi	48
3.6.2 Wawancara	48
3.6.3 Dokumentasi.....	48
3.7 Metode Analisis Data	49
3.7.1 Pengumpulan Data.....	49
3.7.2 Reduksi Data	49
3.7.3 Penyajian Data.....	49
3.7.4 Verifikasi dan Kesimpulan	49
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1 Sejarah Desa Rawang Oguang	51
4.2 Keadaan Geografis	52
4.3 keadaan jumlah penduduk.....	53
4.4 Sarana dan Prasarana Desa.....	54

4.5 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa	55
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	57
BAB VI PENUTUP	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.I : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Rawang Oguang Dalam Memenuhi Undangan Musyawarah Dalam Pembangunan Yang Di Adakan Oleh Kepala Desa Rawang Oguang Tahun 2022-2025.....	3
Tabel I.II : Program Pembangunan Desa Didesa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	5
Tabel II.I : Indikator Evaluasi Menurut Para Pakar.....	40
Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian	44
Tabel III.1 : Informan penelitian.....	46
Tabel III.2 : Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ...	50
Tabel IV.1 : Jumlah pembagian wilayah Desa Rawabg Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	52
Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Didesa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	53
Tabel IV.3 : Jumlah penduduk berdasarkan jumlah pendidikan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	54
Tabel IV.4 : Jumlah Sarana Dan Prasarana Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	55
Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamtan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	56
Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel V.II : Klafikasi Informen Menurut Tungkat Umur	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Didesa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	42
Gambar IV.1 : Skema Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	57

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	: Daftar Wawancara Penelitian.....	63
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian	69
Lampiran 3	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	71
Lampiran 4	: Surat Balasan Riset Penelitian	72
Lampiran 5	: Catatan Bimbingan Proposal.....	74
Lampiran 6	: Catatan Bimbingan Skripsi	75
Lampiran 7	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian.....	77
Lampiran 8	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian	78
Lampiran 9	: Daftar Riwayat Hidup	79

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG

Miranda Meira Yola
NPM.22411048

Proposal penelitian ini dilaksanakan di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kabupaten kuantan singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan Di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, kabupaten kuantan singingi. perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu yang mana jumlah informen pada penelitian ini berjumlah 8 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui wawancara kemudian reduksi data, dan penyajian data. Setelah penulis turun langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan informen yang penulis pilih tersebut maka hasil yang penulis dapat tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT IN RAWANG OGUANG VILLAGE, KUANTAN HILIR SEBERANG DISTRICT

Miranda Meira Yola
NPM.220411048

This research was conducted in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to conduct an in-depth analysis of community participation in rural development within the area. The research problem is formulated as follows: how is the community participation in the development of Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency? The sampling technique utilized a purposive sampling method, selecting a total of 8 informants based on specific criteria. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative approach, involving direct field interviews, followed by data reduction and data presentation. Based on the field investigations and interviews with the selected informants, the findings indicate that the community participation in the development of Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency, is categorized as reasonably good.

Keywords: Community Participation and Village Development.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Desa merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapat kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, terutama melalui pemanfaatan Dana Desa (DD). Kondisi ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal, transparan, serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga.

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial dan rendahnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat menjadi pendekatan yang semakin relevan dan ditekankan dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah.

Menurut (Hastuty 2021) disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan pengetasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Memaksimalkan potensi ekonomi lokal sambil menggunakan sumber daya secara berkelanjutan dan dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Bagian ketiga menjelaskan bahwa agar warga desa

merasakan kedamaian dan keadilan sosial, pembangunan masyarakat harus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kerjasama. Pada hakikatnya tujuan pertumbuhan suatu negara adalah mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk menciptakan dan mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, salah satu tanggung jawab pemerintahan desa adalah mendorong pembangunan diberbagai sektor. Selain itu dapat dipahami bahwa tanggung jawab pemerintahan desa dan warganya dalam memelihara pemerintahan yang mengutamakan dan berhasil termasuk ikut serta dalam peran pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Desa adalah salah satu tingkat pemerintahan terkecil di Negara Bagian, dan sepanjang sejarahnya. Desa memiliki seluruh masyarakat harus sadar dan terlibat aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.

Namun demikian, fenomena terkini di berbagai desa di Indonesia, termasuk di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih beragam dan sering kali belum optimal. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan ruang melalui musyawarah desa, sosialisasi program, dan pelibatan tenaga kerja lokal, tidak semua kelompok masyarakat terlibat secara aktif. Sebagian warga hanya berpartisipasi pada tahap pelaksanaan melalui gotong royong, namun kurang terlibat dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Selain itu, faktor pendidikan, informasi, kesibukan pekerjaan, serta persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana desa turut mempengaruhi tingkat partisipasi.

Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Rawang Oguang, di mana potensi masyarakat sebenarnya cukup besar, tetapi belum sepenuhnya terlibat secara optimal dalam proses pembangunan. Indikasi rendahnya kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa, dominasi elite lokal dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses informasi publik menjadi isu aktual yang mempengaruhi efektivitas pembangunan desa. Situasi ini relevan mengingat pemerintah saat ini terus mendorong penguatan tata kelola desa melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Tingkat kehadiran musyawarah terlihat rendah dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel I.1 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Rawang Oguang Dalam Memenuhi Undangan Musyawarah Dalam Pembangunan Yang Di Adakan Oleh Kepala Desa Rawang Oguang Tahun 2022-2025

No	Tahun	Pelaksanaan Rapat		
		Undangan	kehadiran	persentase%
1.	5 oktober 2022	50	27	54%
2.	21 september 2023	50	23	46%
3.	30 september 2024	50	29	58%

Sumber Data : Kantor Desa Rawang Oguang 2022-2025

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Rawang Oguang masih terdapat warga yang belum terlibat. Hal ini tampak dari data partisipasi masyarakat pada kegiatan musrenbang tahun 2022–2024. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa masih belum optimal, baik dari segi motivasi maupun tingkat kesadaran. Rendahnya motivasi dan kesadaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai masalah.

Adapun rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

1. faktor kesibukan ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh, atau pekerja informal yang memiliki jam kerja tidak menentu. Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan pada waktu kerja atau musim tertentu (seperti musim tanam atau panen) menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk bekerja dibandingkan menghadiri rapat desa karena pertimbangan kebutuhan ekonomi.

2. Faktor rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya musyawarah pembangunan. Sebagian masyarakat masih memandang kegiatan musrenbang sebagai agenda formal pemerintah desa yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Persepsi bahwa hasil musyawarah tidak selalu diwujudkan dalam program nyata menimbulkan sikap apatis, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk hadir meskipun telah menerima undangan.

3. faktor sosial dan budaya. Dalam masyarakat desa, masih terdapat anggapan bahwa urusan perencanaan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah desa atau perwakilan tertentu saja. Pandangan ini menyebabkan sebagian masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses perencanaan kepada aparat desa tanpa merasa perlu terlibat secara langsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem dan mekanisme pelibatan masyarakat yang belum berjalan secara optimal.

Di Desa rawang oguang terdapat indikasi belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana program-program pembangunan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.2 : Program Pembangunan Desa Didesa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Kegiatan pembagunan	Terealisasi	Belum Terealisasi
Pembagunan Sumber Air Bersih Milik Desa	✓	
Pembagunan Jalam Pemungkiman/Gang	✓	
Pembagunan Jalan Usaha Tani	✓	
Pembagunan Turap Skala Besar		✓
Pembagunan Sumber Air Bersih	✓	
Pembagunan Rumah Layak Huni		✓
Pembagunan Embung Desa		✓

Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada pembagunan yang dilaksanakan di Desa Rawang Oguang ini belum terealisasi. Hal ini mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembagunan didesa Rawang Oguang belum maksimal. Maka disini keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam membantu tercapainya pelaksanaan program pembagunan.atas dasar inilah kesadaran masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nanti partisipasinya akan dirasakan.

Masyarakat turut berperan dalam menjaga dan mengelola hasil pembangunan, karena dampak dari pembangunan tersebut akan dirasakan

langsung oleh warga. Oleh sebab itu, program yang telah diberikan sebaiknya dimanfaatkan secara optimal (Fahmi et al 2020) Pada prinsipnya, pembangunan desa merupakan proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Semakin besar keterlibatan warga desa, semakin cepat pula pembangunan dapat diwujudkan, terutama dalam konteks otonomi desa saat ini (Sembel et al 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul tersebut dalam memutuskan untuk melakukan kajian tambahan untuk sebuah karya ilmiah (proposal) dengan judul **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAGUNAN DI DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

1.4 Manfaat Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikannmanfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian dapat dklasifikasikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, pembangunan desa, atau pemerintahan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dan peran mereka dalam pembangunan desa. sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam melakukan penelitian serupa di lokasi atau konteks berbeda.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/ Konsep Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik (Sahya anggara 2016 : 11). Secara harfiah, administrasi berasal dari kata administration (bahasa inggris) atau administratie (bahasa belanda. Istilah administrasi sebagaimana yang dikenal di indonesia dewasa ini, berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan belanda. Setelah ditelusuri istilah ini berasal dari bahasa romawi. Istilah administratif dari bahasa belanda mempunyai dua arti. Pertama, menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaan pencatatan, korespondensi, perhitungan, kearsipan dan semacamnya yang lazim dilakukan dalam tugas kesekretariatan atau tata usaha suatu organisasi. Kedua, menunjukan pada penyelenggaraan pemerintahan.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tinggkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik (Muhammad, 2019:1). Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatnya umum dalam hierarki formal. Diangkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organis terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu

Pekerjaan yang terus berlangsung lama seperti memberikan bahan-bahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawasan. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sahya anggara 2016:).

Aktivitas pengendalian pemerintah dikenal pula dalam istilah berstruktur, yang ilmunya dikenal sebagai dengan sebutan bestuurskunde, ilmu pemerintahan. Bestuurskunde adalah ilmu yang mempelajari cara yang setepatnya untuk menyusun dan memimpin perangkat pemerintah, menentukan hubungan antara sesama aparat dan antara aparat dengan warga negara melalui peraturan-peraturan hukum yang disebut bestuursrecht atau hukum pemerintah (ayi karyana, 2016:22). Dari rumusn pembukaan UUD 1945 tersirat adanya tujuan nasional/ negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan demikian maka tujuan nasional dan tujuan negara adalah identik. Sistem administrasi negara republik indonesia berkaitan erat dengan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, malah keduanya tidak dapat dipisahkan.

Secara terminologi apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelolah. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerjasama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015).

Menurut sondang P.Siagian (dalam syafii, 2010).ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai objek ilmiah yang memiliki kelompok prinsip.dalil, didefinisikan sebagai objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus,yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari

Administrasi negara memiliki beragam pengertian, tergantung pada sudut pandang para ahli. Menurut (Juharni, 2015) terdapat dua pendekatan utama dalam memahami administrasi negara. Pertama, administrasi negara dipandang sebagai fungsi dari cabang eksekutif pemerintahan yang berperan melaksanakan kebijakan publik. Kedua, administrasi negara mencakup keseluruhan aktivitas lembaga

pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang berorientasi pada pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Atmosudirjo dalam (Syafiie, 2019) menegaskan bahwa administrasi merupakan fenomena sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat modern. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi karena keduanya saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan bersama melalui koordinasi dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Waldo dalam (Muhammad 2019) menyebutkan bahwa administrasi negara merupakan seni dan ilmu dalam mengelola serta mengorganisasikan aparatur pemerintahan agar tujuan negara dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, administrasi negara berfungsi sebagai sistem yang mengatur seluruh aktivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Administrasi negara merupakan sebuah disiplin yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik, organisasi publik, kebijakan publik, serta berbagai aktivitas pelayanan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

(Rosenbloom, 2014) menjelaskan administrasi negara sebagai proses yang berada pada irisan antara aspek hukum, politik, dan manajemen. Administrasi negara, menurutnya, tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan dinamika politik yang menghasilkan kebijakan, kerangka hukum yang mengikat tindakan birokrasi, serta prinsip-prinsip manajemen yang mengarahkan efektivitas organisasi publik. Pandangan ini memperkuat bahwa administrasi negara bersifat multidimensional.

(Nawawi 2018) menekankan bahwa administrasi negara mencakup fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini merupakan dasar dalam menjalankan pemerintahan yang terstruktur dan sistematis. Melalui perencanaan, pemerintah dapat menyusun langkah strategis yang tepat sasaran; melalui pengorganisasian, pemerintah memastikan pembagian tugas dan struktur kelembagaan berjalan efektif; melalui pengarahan, aparatur dapat bekerja sesuai tujuan; dan melalui pengawasan, pemerintah dapat mengontrol kualitas pekerjaan dan akuntabilitas publik.

(Dewi, 2018) memberikan perspektif lebih luas dengan menjelaskan bahwa administrasi negara memiliki enam dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas, akuntabilitas, dan demokrasi. Dimensi-dimensi tersebut penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efektif berarti pemerintah mampu mencapai tujuan; efisien berarti penggunaan sumber daya optimal; responsif berarti pemerintah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat; akuntabel berarti setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan; adil berarti pelayanan diberikan tanpa diskriminasi; dan demokratis berarti melibatkan partisipasi publik.

Dalam kerangka global, (Putu & Widanti, 2022) mendefinisikan *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang ditandai oleh transparansi, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan efektivitas lembaga publik. Dengan demikian, administrasi negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan standar internasional.

(Frederickson, 2018) memperkenalkan konsep *social equity* dalam administrasi publik. Ia menegaskan bahwa administrasi negara tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tetapi juga keadilan sosial. Artinya, pelayanan publik harus menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi negara tidak sekadar teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan nilai kemanusiaan.

(Henry, 2017) menyatakan bahwa administrasi negara merupakan proses penyeimbang antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Birokrasi sebagai bagian dari administrasi negara harus menjalankan perintah politik, tetapi tetap menjaga kepentingan publik melalui aturan dan tata kelola yang baik. Henry menegaskan bahwa administrasi negara merupakan penghubung antara keputusan politik yang bersifat abstrak dengan realitas pelaksanaan kebijakan publik yang membutuhkan keterampilan teknis dan profesionalisme aparatur.

Secara keseluruhan, dari berbagai teori dan pendekatan tersebut, administrasi negara dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengintegrasikan struktur birokrasi, kebijakan publik, serta partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Administrasi negara tidak hanya berorientasi pada kinerja internal organisasi, tetapi juga pada dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Administrasi negara berperan sebagai jembatan antara kepentingan publik dan proses pemerintahan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai seperangkat keputusan yang dihasilkan oleh aktor-aktor pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ilmiah, kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai proses sosial, politik, dan administratif yang melibatkan berbagai aktor, lembaga, dan kepentingan.

Menurut (Anisya, 2023) , kebijakan publik merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan yaitu segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif pemerintah dalam bentuk regulasi, program, atau pelayanan publik, serta tindakan pasif berupa keputusan untuk tidak melakukan suatu intervensi terhadap masalah tertentu. Baik tindakan maupun ketidaktindakan tersebut tetap memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat.

Menurut (Siregar, 2024) Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu

ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (*demand*), dan (4) dampak atau outcomes. Selain membahas apa itu kebijakan publik dan unsur-unsurnya, bab ini juga memayamarkan pandangan filsafati tentang kebijakan publik serta tujuan kebijakan publik.

Menurut (Dye 2017), kebijakan publik merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan yaitu segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif pemerintah dalam bentuk regulasi, program, atau pelayanan publik, serta tindakan pasif berupa keputusan untuk tidak melakukan suatu intervensi terhadap masalah tertentu. Baik tindakan maupun ketidaktindakan tersebut tetap memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat.

Menurut (Handoyo et al., n.d. 2012 : 1) Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (*demand*), dan (4) dampak atau outcomes. Selain membahas apa itu kebijakan publik dan unsur-unsurnya, bab ini juga memaparkan pandangan filsafati tentang kebijakan publik serta tujuan kebijakan publik.

Dalam kebijakan publik terdapat kerangka kerja. Kerangka kerja tersebut ditentukan oleh beberapa variabel (Subarsono :2006 : 7-8) dalam (Ii et al., 2009) variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana semakin mudah mencapainya.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu diipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang dan terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu

kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top down approach* atau *bottom –up approach*, otoriter atau demokrasi.

Sementara itu, (Anderson 2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai aerangkaian tindakana yang bertujuan yang diikuti oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau perkara yang menjadi perhatian. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan jelas dan dilakukan secara sistematis oleh aktor-aktor yang berwenang dalam rangka menangani isu yang dianggap penting dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik bukanlah langkah yang diambil secara spontan, melainkan hasil dari proses perencanaan, analisis, dan pertimbangan yang matang.

Dalam pandangan kontemporer, kebijakan publik tidak lagi hanya berorientasi pada keputusan politik, tetapi juga pada kualitas bukti dan data yang mendasarinya. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan berbasis bukti. (Head 2016) menjelaskan bahwa *evidence-based policy* adalah proses pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada data empiris, kajian ilmiah, dan temuan yang terukur untuk menjamin efektivitas kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas politik, meningkatkan rasionalitas keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, kebijakan publik diharapkan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga adaptif dan akuntabel.

Selain itu, (Haeranah, 2024) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang berlangsung secara berulang melalui apa yang disebut sebagai *policy cycle*. Siklus kebijakan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi, dan terminasi atau revisi kebijakan. Setiap tahap dalam siklus tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi, sehingga menghasilkan kebijakan yang dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan. Model ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah produk final, melainkan suatu proses berkesinambungan yang menuntut pemantauan dan perbaikan secara terus-menerus.

Dalam konteks pemerintahan daerah dan desa, kebijakan publik memiliki peran penting sebagai instrumen dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, dituntut untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Nugroho 2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mengutamakan kesejahteraan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. Pendekatan ini penting karena karakteristik permasalahan di tingkat lokal sering kali berbeda dengan konteks nasional, sehingga kebijakan pada level desa harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses yang kompleks, multidimensi, dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah

sebagai pengambil keputusan utama, masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan, hingga kelompok kepentingan yang turut memengaruhi arah kebijakan. Konsep kebijakan publik menekankan pentingnya proses yang terencana, berbasis bukti, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap pembangunan dan kesejahteraan publik.

2.1.3 Teori Pemerintahan Desa

Pemerintah desa, atau yang dikenal sebagai *pemerintahan desa (pemdes)*, merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki fungsi utama untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat setempat.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. (Hukum & Suryadarma, 2018)

Menurut (Ndraha 2008), pemerintahan desa merupakan proses pembangunan yang dikelola secara langsung oleh masyarakat desa. Artinya, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.

Sejalan dengan itu, (Suparmoko 2008) menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah, termasuk desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa merupakan bentuk nyata dari desentralisasi dan otonomi lokal yang memungkinkan masyarakat desa berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Menurut (Sutiyo & Maharjan 2017), pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor pembangunan lokal yang memegang prinsip *partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel*. Pemerintahan desa menjadi ujung tombak pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat sehari-hari.

Menurut (Ermaya, 2016), UU Desa mengubah peran desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan, sehingga desa diberikan keleluasaan merancang pembangunan sesuai potensi lokal.

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. (Prasetyo 2020) menjelaskan bahwa struktur ini membentuk sistem pemerintahan lokal yang memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Ia

menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut (Ra'is, 2022), pemerintahan desa juga merupakan arena interaksi antara birokrasi lokal dengan masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menjadi fasilitator yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good village governance* yang mencakup akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, efektivitas pemerintahan, dan partisipasi masyarakat.

(Yustika 2017) menyatakan bahwa pemerintahan desa memainkan peran penting dalam pengelolaan Dana Desa, karena melalui dana tersebut desa dapat mengembangkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Namun efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Menurut (Kadir 2020), keberhasilan pemerintahan desa sangat terkait dengan kualitas kepemimpinan kepala desa. Kepala desa yang partisipatif, komunikatif, dan terbuka terhadap masukan cenderung lebih berhasil menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang tertutup dan sentralistik dapat menghambat partisipasi masyarakat.

(Rahman 2019) juga menyebutkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kekuasaan pemerintah desa melalui fungsi legislasi desa, pengawasan, dan representasi masyarakat. BPD yang aktif dapat meningkatkan

keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan memastikan bahwa arah pembangunan sesuai aspirasi warga.

Sejalan dengan penelitian (Fitriana 2022), pemerintahan desa yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki tata kelola baik, transparansi anggaran, dan mekanisme komunikasi publik yang efektif. Di banyak desa, lemahnya komunikasi publik menjadi hambatan partisipasi masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui program yang sedang atau akan dilaksanakan pemerintah desa.

Berdasarkan berbagai teori dan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga otonom yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik, kapasitas aparatur, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat. teori pemerintahan desa menjadi dasar untuk memahami bagaimana peran pemerintah desa Rawang Oguang dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2.1.4 Teori Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan desa, karena SDM menjadi penentu utama keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan administrasi, dan melaksanakan pembangunan desa. Berbagai teori menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang bekerja di dalamnya.

Menurut (Armstrong & Taylor 2017), manajemen SDM adalah pendekatan strategis terhadap pengelolaan orang dalam organisasi agar mereka

dapat memberikan kontribusi maksimal. Mereka menekankan bahwa SDM yang kompeten harus dikelola melalui proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, serta pemberian motivasi yang tepat. Dengan demikian, pengembangan SDM bukan hanya tugas administratif, tetapi strategi organisasi untuk mencapai tujuan.

(Rivai 2017) menguatkan pandangan tersebut dengan menambahkan bahwa pengelolaan SDM meliputi proses pembinaan, pelatihan, penempatan pegawai sesuai kompetensi, serta evaluasi kinerja secara berkala. Ia menegaskan bahwa kinerja organisasi pemerintah akan berjalan baik apabila setiap individu memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta memiliki kompetensi yang memadai. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas perangkat desa menjadi salah satu strategi penting dalam tata kelola desa.

(Hasibuan 2019) menyatakan bahwa SDM yang berkualitas ditandai dengan sikap disiplin, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, serta motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Dalam pemerintahan desa, dimensi ini sangat relevan karena perangkat desa berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga kemampuan interpersonal, komunikasi, dan pelayanan publik menjadi sangat penting.

Menurut (Widodo 2015), kualitas SDM dalam organisasi publik sangat menentukan kualitas kebijakan, efektivitas pelayanan, dan keberhasilan program pemerintah. Ia menekankan bahwa dalam organisasi pemerintahan, pengembangan SDM tidak hanya terkait kemampuan teknis, tetapi juga integritas, etika, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam konteks desa, hal ini

menjadi sangat penting karena perangkat desa sering memegang data, mengelola anggaran, dan berperan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Sementara itu, (Sedarmayanti 2017) menambahkan bahwa pembangunan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, workshop, serta bimbingan teknis (bimtek) yang berkelanjutan. Desa dengan SDM yang terlatih akan mampu mengelola Dana Desa, menyusun perencanaan pembangunan desa, serta menjalankan pelayanan publik dengan lebih akuntabel dan transparan.

Dalam perspektif pembangunan desa, (Suryanto 2020) menegaskan bahwa kualitas SDM perangkat desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program pembangunan desa, seperti penyusunan RKPDDes, APBDDes, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelayanan administrasi masyarakat. Desa dengan SDM yang lemah cenderung mengalami keterlambatan dalam perencanaan, kesalahan dalam pencatatan keuangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Dari berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa SDM dalam pemerintahan desa memegang peran strategis dalam menentukan jalannya pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta keberhasilan program-program pembangunan desa. SDM yang kompeten, berintegritas, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan tata kelola desa, sementara SDM yang lemah dapat menyebabkan ketidakefisienan, rendahnya kualitas layanan, dan gagalnya program pembangunan.

2.1.5 Teori/Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk

memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sesama anggota masyarakat.

Menurut (Lukmanul Hakim 2015), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka ada tiga unsur penting dalam partisipasi yaitu :

- 1) Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- 2) Keterlibatan memberikan suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelawan untuk membantu kelompok.
- 3) Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab didalam program pembangunan masyarakat ialah

mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan kepentingan rasa kepuasan bagi mereka.

Menurut ((Robertho Puay et al., 2025), bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

1) Perencanaan

Pemberdayaan masyarakat akan berjalan apabila warga menggunakan haknya untuk terlibat secara aktif sejak proses penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan desa. Kehadiran masyarakat dalam rapat, pemberian ide, serta kontribusi waktu menjadi ukuran tingkat partisipasi dalam perencanaan.

Penyusunan rencana pembangunan desa diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian disusun program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Sebelum digunakan sebagai acuan, rencana tersebut harus ditetapkan sebagai dokumen resmi desa melalui musyawarah desa atau rapat Badan Permusyawaratan Desa.

Partisipasi pada tahap ini dapat berupa tanggapan, kritik, atau dukungan terhadap rencana yang diajukan. Ketika rencana pembangunan telah disepakati pemerintah desa, dokumen tersebut menjadi pedoman resmi pelaksanaan pembangunan.

a. Memberikan ide dan saran dalam musyawarah

Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan masukan merupakan sarana bagi pemerintah desa untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemberian ide dan saran menjadi bentuk aspirasi yang dapat dihimpun untuk kepentingan bersama, sekaligus meningkatkan kualitas program pembangunan.

b. Merencanakan program pembangunan desa

Untuk mencapai pembangunan yang efektif, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional, masyarakat dapat mengusulkan program yang menjadi acuan pembangunan sesuai pedoman yang berlaku.

c. Mengevaluasi program pembangunan desa

Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan indikator yang telah ditetapkan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan kritik dan solusi terhadap pembangunan yang sudah dijalankan.

2) Pelaksanaan

Program yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pada tahap ini, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemberian tenaga, keterampilan, barang, atau dana. Tingkat keseriusan masyarakat dalam menyumbangkan waktu, tenaga, maupun materi menunjukkan sejauh mana mereka terlibat dalam menyukseskan pembangunan desa.

a. Memberikan bantuan tenaga

Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga, semakin cepat pula pembangunan dapat terealisasi. Partisipasi tenaga biasanya terwujud dalam kegiatan gotong royong sebelum atau saat program pembangunan dijalankan.

b. Merawat hasil pembangunan

Masyarakat juga berperan dalam memelihara hasil pembangunan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kegiatan menjaga, membersihkan, atau memperbaiki fasilitas pembangunan yang mulai mengalami kerusakan.

c. Memberikan bantuan materi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Partisipasi materi dapat berupa sumbangan barang, kebutuhan konsumsi, peralatan, ataupun uang secara sukarela.

3) Pengawasan

Pengawasan masyarakat sangat penting untuk menjamin program pembangunan berjalan sesuai rencana. Melalui pengawasan, masyarakat dapat menilai efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan, sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan atau hambatan yang muncul.

a. Aktif dalam pengawasan pembangunan

Masyarakat dapat memberikan kritik, saran, atau laporan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dilakukan baik saat pelaksanaan maupun setelah pembangunan selesai.

b. Aktif dalam pengawasan keuangan desa

Partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui upaya mengetahui besaran anggaran dan jenis program pembangunan yang dilaksanakan. Informasi anggaran biasanya disampaikan melalui musyawarah atau media informasi desa yang dapat diakses masyarakat.

4) Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi merupakan tahapan penting untuk menilai keberhasilan pembangunan desa secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan setelah program atau kegiatan pembangunan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan. Melalui evaluasi, masyarakat dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah desa sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa, sekaligus mencerminkan tingkat kesadaran dan kepedulian warga terhadap keberlanjutan hasil pembangunan. Partisipasi evaluatif juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

a. Memberikan penilaian terhadap hasil pembagunan

Masyarakat berpartisipasi dengan menilai apakah program pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebutuhan, dan harapan warga. Penilaian ini dapat disampaikan melalui forum musyawarah desa, rapat evaluasi, atau secara informal kepada aparat desa.

b. Memberikan kritik dan saran perbaikan

Partisipasi evaluasi ditunjukkan melalui penyampaian kritik, masukan, serta rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan yang dinilai belum optimal. Kritik dan saran dari masyarakat menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.

c. Menilai manfaat dan dampak pembangunan

Masyarakat turut berperan dalam mengevaluasi manfaat nyata dari pembangunan yang telah dilaksanakan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Evaluasi ini mencakup sejauh mana pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta apakah terdapat dampak negatif yang perlu ditangani.

Menurut (Isbandi 2017), partisipasi masyarakat adalah proses keterlibatan mental, emosional, dan fisik masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Isbandi menegaskan bahwa masyarakat harus diberikan ruang, kesempatan, akses informasi, dan dukungan yang memadai agar dapat benar-benar terlibat.

(Soetomo 2019) menjelaskan bahwa partisipasi muncul karena adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. Tanpa partisipasi, pembangunan desa cenderung bersifat *top-down*, tidak efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi memastikan bahwa pembangunan lebih tepat sasaran.

(Huraerah 2018) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari kontribusi tenaga, dana, pikiran, gagasan,

dan pengawasan yang diberikan oleh warga. Partisipasi ini tidak hanya fisik, tetapi juga non-fisik, seperti kehadiran dalam musyawarah desa, memberikan usulan, dan mengawasi penggunaan dana desa.

Menurut (Yuwono 2020), partisipasi masyarakat pada era Dana Desa semakin penting karena masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas alokasi anggaran desa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga sejauh mana masyarakat berpartisipasi pada proses perencanaan dan pengawasan Dana Desa.

(Sari 2020) menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan berdampak pada meningkatnya kualitas pembangunan, menurunnya potensi konflik, serta meningkatnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Sari menemukan bahwa desa yang memiliki tingkat partisipasi tinggi cenderung lebih cepat berkembang.

(Fahrudin 2018) menambahkan bahwa partisipasi tidak akan berjalan tanpa adanya keterbukaan informasi publik dari pemerintah desa. Akses informasi seperti rencana kegiatan, anggaran, dan laporan pertanggung jawaban sangat menentukan apakah masyarakat mau dan mampu terlibat.

(Mardikanto & Soebiato 2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar, terlibat, dan mengontrol pembangunan sehingga masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan objek.

Ciri – ciri masyarakat perdesaan

Dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penting penting untuk melihat karakteristik masyarakat perdesaan itu sendiri. Karakter sosial desa sangat memengaruhi pola keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut kajian sosiologi pedesaan (Soetomo, 2019; Huraerah, 2018), masyarakat perdesaan umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hubungan Sosial yang Erat dan Bersifat Kekeluargaan

Masyarakat desa memiliki hubungan sosial yang lebih dekat dan intens dibandingkan masyarakat perkotaan. Interaksi berlangsung secara langsung (face to face) dan didasarkan pada nilai kekeluargaan, kebersamaan, serta saling mengenal satu sama lain. Kondisi ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mendorong partisipasi melalui gotong royong dan musyawarah.

2. Tingkat Solidaritas dan Gotong Royong Tinggi

Budaya gotong royong masih menjadi ciri khas masyarakat desa. Kerja bersama dalam kegiatan sosial maupun pembangunan merupakan tradisi yang telah mengakar.

Hal ini mempermudah mobilisasi partisipasi dalam bentuk tenaga, terutama pada tahap pelaksanaan pembangunan desa.

3. Ketergantungan pada Sumber Daya Lokal

Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, atau usaha berbasis sumber daya alam. Ketergantungan ini membuat masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap pembangunan desa yang menyangkut infrastruktur dan ekonomi lokal.

4. Struktur Sosial yang Relatif Sederhana

Struktur sosial masyarakat desa cenderung homogen dari segi mata pencaharian, budaya, maupun pola hidup. Namun, kepemimpinan informal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi partisipasi.

5. Akses Informasi yang Terbatas

Dibandingkan masyarakat perkotaan, masyarakat desa umumnya memiliki akses informasi yang lebih terbatas. Oleh karena itu, transparansi pemerintah desa sangat menentukan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat.

6. Tingkat Pendidikan yang Relatif Beragam

Variasi tingkat pendidikan di desa dapat memengaruhi kualitas partisipasi, terutama dalam bentuk penyampaian gagasan, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan.

2.1.6 Teori Masyarakat dan Desa

Teori mengenai masyarakat dan desa merupakan dasar penting dalam memahami dinamika sosial, struktur, dan hubungan antarindividu yang terjadi dalam ruang sosial pedesaan. Secara konseptual, masyarakat dipandang sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, saling berinteraksi, dan terikat oleh norma, nilai, serta sistem sosial tertentu. Desa kemudian menjadi unit terkecil dari sistem masyarakat tersebut, yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas.

Menurut (Castillo, 2023), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan terikat

oleh rasa identitas bersama. Dalam konteks pedesaan, ikatan sosial ini cenderung lebih kuat dibandingkan masyarakat perkotaan, karena masyarakat desa biasanya memiliki hubungan kekerabatan, keturunan, dan kebersamaan yang lebih intensif. Interaksi sosial yang kuat menjadikan desa sebagai ruang sosial yang stabil dan kohesif.

Lebih jauh, (Yahya & Yahya, 2020) memperkenalkan konsep *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* untuk menggambarkan dua bentuk hubungan sosial. Masyarakat desa cenderung mencerminkan bentuk *Gemeinschaft* (paguyuban), yaitu hubungan sosial yang erat, intim, dan berlandaskan nilai kekeluargaan serta tradisi. Pada masyarakat desa, kehidupan sosial lebih mengutamakan kebersamaan, solidaritas, dan kepentingan kolektif. Sebaliknya, *Gesellschaft* (patembayan) lebih dominan pada masyarakat perkotaan, yang bercirikan hubungan rasional, individualistik, dan berdasarkan kepentingan fungsional. Dengan demikian, konsep ini menggambarkan bahwa desa cenderung memiliki sifat sosial yang integratif dan komunal.

Dari perspektif pembangunan pedesaan, (Chambers 2020) berpendapat bahwa masyarakat desa memiliki potensi lokal berupa sumber daya manusia, sosial, dan lingkungan yang dapat diberdayakan melalui pendekatan partisipatif. Menurutnya, pembangunan desa yang efektif harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, sehingga keputusan dan proses pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Pendekatan ini dikenal sebagai *people-centered development* atau pembangunan yang berpusat pada manusia.

Masyarakat desa dalam kajian sosiologi pedesaan dipahami sebagai kesatuan sosial yang memiliki karakteristik khas seperti ikatan sosial yang kuat, pola hubungan yang bersifat personal, serta keterikatan yang tinggi terhadap nilai-nilai tradisional (Soetomo, 2012).

Menurut (Suhaeb & Kaseng, 2023), desa bukan hanya wilayah administratif, tetapi juga merupakan komunitas sosial yang hidup berdasarkan sistem nilai, norma, serta modal sosial yang telah berkembang secara turun-temurun.

(Suroto 2016) mengemukakan bahwa dinamika masyarakat desa dapat dipahami melalui hubungan antara struktur kekuasaan lokal dan peran lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, PKK, dan karang taruna. Struktur-struktur ini menjadi mediator antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi dominasi elite desa yang membuat proses musyawarah menjadi tidak inklusif. Hal ini juga ditegaskan oleh Nugraheni (2019) yang menyatakan bahwa elite capture merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pemerataan partisipasi masyarakat di desa.

Menurut (Sanderson 2014), masyarakat pedesaan sering menghadapi fragmentasi sosial yaitu perbedaan kepentingan antar kelompok, sehingga partisipasi tidak selalu merata. Desa dengan tingkat stratifikasi tinggi dan dominasi elite yang kuat cenderung menghasilkan partisipasi yang timpang di mana keputusan banyak dipengaruhi kelompok tertentu. Ini relevan dalam analisis pembangunan desa, karena pembangunan yang tidak inklusif rentan mengabaikan kebutuhan kelompok marginal.

(Wulandari 2020) menegaskan bahwa pembangunan desa harus sensitif terhadap struktur sosial lokal. Intervensi pembangunan yang tidak memahami dinamika sosial, relasi kuasa, dan budaya lokal sering kali gagal meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, studi masyarakat desa perlu memasukkan aspek konteks sosial, struktur kekuasaan lokal, tingkat pendidikan, dan jaringan organisasi masyarakat.

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dalam waktu yang lama dan terikat oleh norma serta kebudayaan yang sama. Menurut Horton dan Chester dalam (Yulianti, 2022), masyarakat adalah kumpulan individu yang saling bergantung satu sama lain, tinggal di wilayah tertentu, serta berbagi budaya dan sistem kehidupan bersama.

Menurut (Isdairi 2021) bahwa masyarakat memiliki eksistensi yang objektif dan independen dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Setiap individu memiliki fungsi dan peran sosial yang berbeda, tetapi saling berhubungan untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial.

Berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terorganisir, di mana anggotanya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat berperan sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan melalui interaksi sosial, gotong royong, dan kesadaran kolektif.

2.1.7 Teori/ Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan mengalami perkembangan yang panjang dalam kajian ilmu sosial dan kebijakan publik. Secara umum, pembangunan dipahami

sebagai suatu proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terencana untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik.

Beberapa pendekatan pembangunan tradisional terlalu menekankan hasil akhir dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan proses dan keterlibatan masyarakat. Hal ini sering menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan karena tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

Menurut (Antonius, 2024), pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menekankan pemanfaatan potensi lokal, penguatan institusi desa, serta partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Kuncoro menegaskan bahwa desa harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pelaksanaan proyek.

Sementara itu, (M. Harry Mulya Zein & Sisca Septiani, 2021) menyatakan bahwa pembangunan desa memerlukan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *people-centred development*, yaitu pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, mempertimbangkan kebutuhan lokal, dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan.

Dalam kajian lain, (Purba et al., 2023) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, tata kelola yang baik, dan keterlibatan masyarakat. Desa yang memiliki tata kelola transparan serta memberikan ruang bagi warga untuk mengawasi penggunaan dana desa cenderung memiliki capaian pembangunan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip *good village governance*, yaitu tata kelola pemerintahan desa yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan inklusivitas.

Menurut (Nurhayati Harahap et al., 2023), pembangunan merupakan suatu rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk mencapai modernitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses transformasi menuju kondisi sosial yang lebih baik, di mana masyarakat menjadi subjek utama dalam proses perubahan tersebut. Ide pokok pembangunan menurut siagian mengandung makna:

- (a) Bahwa pembagunan merupakan suatu proses tanpa akhir
- (b) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus
- (c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya beriorintasi pada pertumbuhan dan perubahan
- (d) Pembagunan mengarah kepada modernitas
- (e) Modernitas yang dicapai melalui pembagunan bersifat multi dimensional, proses dan kegiatan pembagunan ditunjukkan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Pembagunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya nilai keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapain pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia (Rohman,2017).

Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila itu terkait usaha-usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu lebih banyak dikaitkan dengan kemajuan material atau ekonomi. Namun, saat ini, konsep pembangunan telah mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih bermultimensi.

Dengan demikian, masalah pembangunan juga harus didekati dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu. Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Konsep pembangunan ini mengandung arti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau fisik seperti kecukupan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan, tetapi juga aspek batiniah atau non fisik, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan rasa keadilan.

Dengan demikian, konsep pembangunan sesuai dengan GBHN adalah rangkaian upaya perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan seperti yang dikemukakan oleh (Nurhayati Harahap et al., 2023) mengandung 3 aspek:

1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas (capacity) kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan untuk itu.
2. Pembangunan harus menekankan pada pemerataan (equity), perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat.
3. Pembangunan menekankan pada pertumbuhan. Karena konsep keberlangsungan dan kelestarian ini, untuk memajukan dan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilaksanakan terhadap suatu usaha atau rangkain yang sangat penting diperhatikan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus serta perencanaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.

Tabel II.1 Indikator Evaluasi Menurut Para Pakar

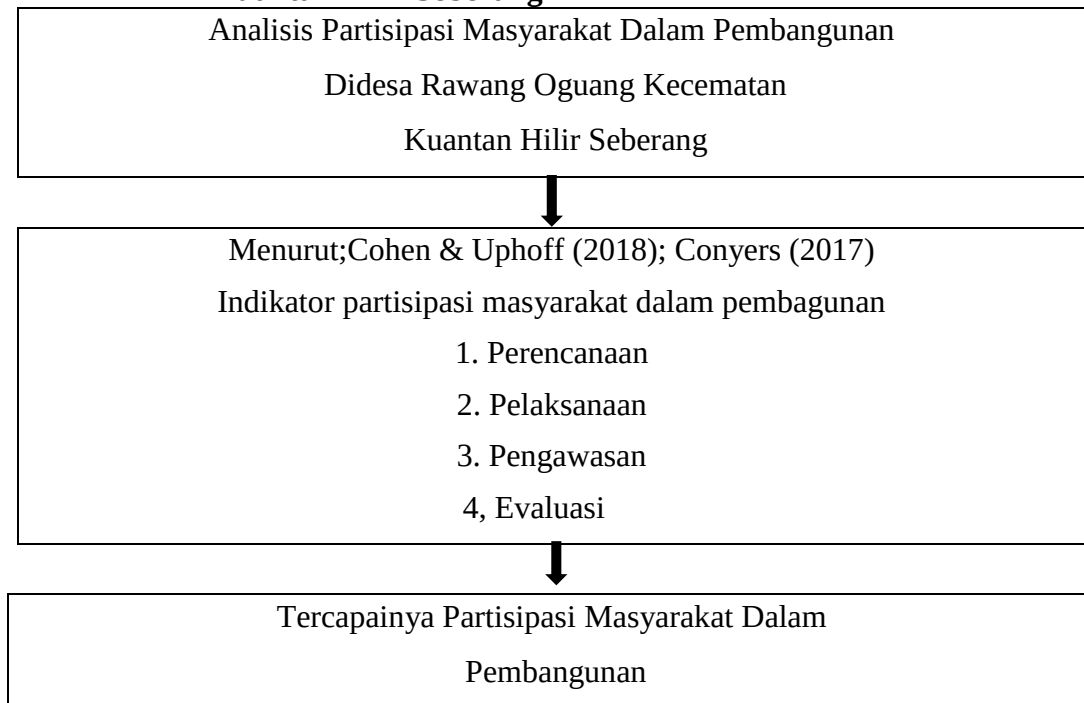
Cohen & Uphoff (diadaptasi 2018)	Arnstein (diadaptasi 2019)	Mikkelsen (diadaptasi 2020)	Conyers (diadaptasi 2017)	Pretty (diadaptasi 2021)
Partisipasi Perencanaan – keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan pembangunan desa	Informing – masyarakat memperoleh informasi terkait program pembangunan desa	Pengambil an Keputusan – keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan	Perencanaan – partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa	Partisipasi Pasif – masyarakat menerima hasil pembangunan tanpa keterlibatan aktif
Partisipasi Pelaksanaan – keterlibatan masyarakat dalam	Consultation – masyarakat diberi ruang	Kontribusi Masyarakat – sumbangan	Pelaksanaan – keterlibatan masyarakat dalam	Partisipasi Konsultatif – masyarakat

pelaksanaan kegiatan pembangunan	menyampaikan pendapat	tenaga, pikiran, dan sumber daya	kegiatan pembangunan	dimintai pendapat
Partisipasi Pemanfaatan Hasil – masyarakat menggunakan dan menikmati hasil pembangunan	Involvement – masyarakat mulai dilibatkan dalam kegiatan pembangunan	Pengaruh terhadap Hasil – sejauh mana aspirasi masyarakat mempengaruhi hasil pembangunan	Evaluasi – keterlibatan masyarakat dalam penilaian hasil pembangunan	Partisipasi Interaktif – dialog dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa
Partisipasi Pengawasan – masyarakat ikut dan mengevaluasi pembangunan	Partnership – kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat	Kemandirian Masyarakat – kemampuan masyarakat mengelola pembangunan secara mandiri	Penerimaan Hasil – manfaat pembangunan dirasakan oleh masyarakat	Partisipasi Mandiri – masyarakat berinisiatif dan bergerak sendiri

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menemukannya. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Gambar II.I Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Didesa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya masih perlu dsusun dalam kalimat pernyataan sementara. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh penelitian adalah sebagai berikut ” Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang”

2.4 Defenisi Operasional

Agar penelitian memiliki kejelasan arah dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka konsep–konsep utama dalam penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Perencanaan Pembangunan

mencakup proses penetapan tujuan, sasaran, strategi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan, analisis situasi, serta penentuan sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan dapat berjalan efektif. Perencanaan yang baik mencerminkan adanya kejelasan arah, kesesuaian dengan kebijakan, dan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan.

2.4.2. Pelaksanaan Pembangunan

merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Pada tahap ini diperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, efektivitas penggunaan sumber daya, serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pelaksanaan yang baik ditandai dengan pencapaian target, ketepatan waktu, serta kualitas hasil yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.4.3. Pengawasan pembangunan

berperan sebagai alat kontrol untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaporan hasil, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, penyimpangan dapat diminimalkan, transparansi dapat ditingkatkan, dan akuntabilitas pelaksanaan program dapat terjaga dengan baik.

2.4.4. Evaluasi pembangunan

Merupakan proses penilaian yang dilakukam secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan

dibandingkan dengan tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Evaluasi mencakup penilaian terhadap hasil (output), manfaat (outcome), serta dampak (impact) pembangunan, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, relevansi, maupun keberlanjutan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mengidentifikasi kendala dan kelemahan pelaksanaan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi dalam perencanaan	1. Memberikan ide dan saran dalam musyawarah 2. Merencanakan program pembangunan desa
	Partisipasi dalam pelaksana	1. Sumbagan tenaga 2. Merawat hasil pembangunan desa
	Partisipasi dalam pengawasan	1. Aktif dalam pemantauan pembangunan desa 2. Aktif dalam pemantauan keuangan desa
	Partisipasi dalam evaluasi	1. Terlibat dalam kegiatan evaluasi pembangunan desa 2. Memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan desa

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan deskriptif kualitatif**. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bentuk, tingkat, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna partisipasi masyarakat dari sudut pandang pelaku sosial, bukan sekadar dari data statistik.

Menurut (Moleong 2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3.2 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian. Informen dalam penelitian kualitatif adalah informen penelitian yang memahami informen tentang objek penelitian. Informen yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Teknik penentuan informan menggunakan ***purposive sampling***, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui persoalan yang diteliti. (Sugiyono 2019) menjelaskan, Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga sampel tersebut layak dijadikan sumber data informen yang dipilih sebagai berikut.

Tabel III.1 : Informan penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala Desa Rawang Oguang	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kaur Pembagunan	1
4.	Ketua BPD	1
5.	Tokoh Masyarakat	4
Total		8

Sumber : Data Olahan Penelitian 2025

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui konsioner yang diteliti dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini Masyarakat Desa Rawang Oguang.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Mencangkup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari monografi, literatur dan buku selain itu juga. Data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian lapangan

3.4 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Rawang Oguang. pembangunan di desa tersebut, yang merupakan program yang dirancang oleh Pemerintah Desa, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena partisipasi masyarakat yang belum memadai.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini Berlokasi di Kantor Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Lokasi ini dipilih karena karena terdapat fenomena partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam proses pembangunan desa, khususnya pada tahapan perencanaan dan pengawasan. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa serta belum meratanya partisipasi setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, desa rawang oguang dinilai relevan dan representatif untuk diteliti karena sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian saya, yaitu menganalisis bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti meliputi:

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan bersifat langsung, dengan tujuan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang..

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua pihak untuk bertukar informasi dan gagasan melalui dialog tanya jawab, sehingga memungkinkan pembentukan makna terkait topik tertentu (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa staf kantor desa tersebut, serta warga masyarakat di Desa Rawang Oguang . Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara terstruktur kepada narasumber kunci dengan menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang relevan dengan judul penelitian. Alat yang digunakan meliputi ponsel, buku catatan, dan pena.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis seperti buku atau literatur yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Rawang oguang , serta dari buku-buku, situs web resmi, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian menjelaskannya dalam bentuk uraian yang akurat. Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif dengan model interaktif berdasarkan pandangan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

3.7.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta data tambahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang muncul dari catatan-catatan lapangan, Memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dengan baik, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah selanjutnya.

3.7.4 Verifikasi dan Kesimpulan

verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan peneliti sejak awal pengumpulan data, meskipun masih bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan untuk mencapai pemahaman yang lebih terjamin kebenarannya dan validitasnya. Setelah peneliti yakin bahwa data hasil penelitian akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti kemudian menyimpulkan secara final sebagai penutup penelitian, yang memberikan gambaran tentang "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal		x	x	x																				
3	Bimbingan Proposal					x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x									
4	Seminar Proposal																x								
5	Revisi Proposal																	x	x						
6	Pembuatan Skripsi																			x					
7	Bimbingan Skripsi																				x	X	x		
8	Bidang Skripsi																							X	
9	Revisi Skripsi																								x

Sumber :Modifikasi Penelitian 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Rawang Oguang

Desa Rawang Oguang adalah desa pemekaran yang awalnya Desa Sungai Sorik, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya desa ini adalah dusun III Desa Sungai Sorik, jumlah penduduk awalnya sebanyak 1454 jiwa dan KK nya 166 KK. Dengan adanya rencana pemekaran kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Sungai Sorik juga di mekarkan oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 Desa Sungai Sorik di mekarkan sehingga menjadi Desa baru namanya Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan Pucuk adat dibantu oleh kepala-kepala suku atau di sebut juga dengan nama Ninik Mamak Nen Barompek. Adapun persukuan dan gelar kepala suku yang ada di Desa Rawang Oguang Yaitu Suku Tigo Kampung, Suku Limo Kampung, Suku Malayu, dan Suku Cemin.

Sedangkan Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Rawang Oguang adalah sebagai berikut :

Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019 adalah Syapris

Periode Tahun 2019 s/d Sekarang adalah Dedi,S.pd

Desa rawang oguang merupakan salah satu yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan mayoritas penduduk asli desa yang mempunyai beberapa suku seperti, Suku Tigo Kampung, Suku Limo Kampung, Suku Cemin, Dan Suku Malayu. Dari setiap suku di kepalai oleh kepala suku yang di sebut

sebagai ninik mamak, dimana ninik mamak sangat berperan di desa sebagai menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan suku di desa.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Rawang Oguang Berada Dikecamatan Kuantan Hilir Seberang Dengan Ibu Kota Koto Rajo. Didesa Rawang Oguang merupakan desa yang paling ujung bagian selaatan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.. Desa Rawang Oguang memiliki luas wilayah 682 Ha. Adapun batas-batas wilayah di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan Desa Sungai Sorik
2. Sebelah selatan berbatasan Desa Pundi Kayu Pematang Peranap
3. Sebelah Barat berbatasan Desa Teratak Jering
4. Sebelah Timur berbatasan Desa Pulau Beralo dan Petai Inuman

Tabel IV.1 Jumlah pembagian wilayah Desa Rawabg Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Wilayah	Luas wilayah	Persentase (%)
1.	Pemukiman	10	1,47%
2.	Pertanian Sawah	25	3,67%
3.	Ladang/tegalan	2	0,29%
4.	Perkebunan	600	87,98%
6.	Perkantoran	0,25	0,4%
7.	Sekolah	0,25	0,4%
8.	Jalan	40	5,87%
Jumlah		682	100%

Sumber : RPJM Desa Rawang Oguang Thun 2026

Desa Rawang Oguang merupakan desa yang paling ujung yang memiliki jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kecamatan yaitu 3,2 KM atau dapat ditempuh selama 15 menit, sedangkan untuk jarak Ibukota Kabupaten yaitu 1 jam perjalanan. Desa Rawang Oguang memiliki 3 (tiga) dusun yaitu dusun I, dusun II, dusun III, yaitu setiap dusun terdapat 2 (dua) RT dan memiliki 3 (tiga) RW.

4.3 Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah 1.940 jiwa yang terdiri dari 965 laki-laki dan 975 perempuan. Dan jumlah kepala keluarga yaitu 457 KK. Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Laki – Laki	965	47,74%
2.	Perempuan	975	50,26%
Jumlah		1.940	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 1.940 jiwa Penduduk Desa Rawang Oguang jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah jenis kelamin laki – laki yaitu dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 965 jiwa atau 47,74% sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 975 jiwa atau 50,26%.

Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 Jumlah penduduk berdasarkan jumlah pendidikan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	TK / PAUD	24 orang	11,11%
2.	SD / MI	83 orang	38,43%
3.	SLTP/ MTS	58 orang	26,85%
4.	SLTA / MA	36 orang	16,67%
5.	SI / Diploma	15 orang	6,94%
Jumlah		216 orang	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2026

4.4 Sarana Dan Prasarana Desa

Sebagai sebuah desa yang menjalankan kehidupan sosial dan pemerintahan layaknya desa-desa lain, desa Rawang Oguang memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan harapan. Sarana dan prasarana tersebut seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana kesehatan, kantor desa balai desa dan lainnya.

Tabel IV.4 Jumlah Sarana Dan Prasarana Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Total
1.	Sarana Pendidikan - TK/PAUD	1 unit	1 unit
2.	Tempat Ibadah - Masjid - Musholah	1 unit 3 unit	4 unit
3.	Sarana Olahraga - Lapangan Voli	1 unit	1 unit
4.	Kantor Desa	1 unit	1 unit
5.	Balai Desa	1 unit	1 unit
6.	Sarana Kesehatan - Puskesmas	1 unit	1 unit
Jumlah		9 unit	9 unit

Sumber: Olahan data penelitian tahun 2026

4.5 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa

Perekonomian masyarakat tentunya merupakan tolak ukur dari kemakmuran suatu wilayah. Sedangkan pekerjaan masyarakat merupakan bagian yang tidak jelas dari perekonomian. Hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan masyarakatlah yang menentukan perekonomian masyarakat tertentu.

Adapun pekerjaan masyarakat Rawang Oguang sebagian besar adalah petani karet, sedangkan sebagian lainnya terbagi kedalam beberapa jenis pekerjaan seperti pedagang, pegawai negeri sipil, tukang, guru, TNI/Polri, pensiunan, Sopir/Angkutan, buruh, swasta, peternak. Untuk lebih jelasnya terkait dengan

kondisi perekonomian masyarakat desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berdasarkan pekerjaan, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase(%)
1.	Petani	378	49,09%
2.	Pedagang	27	3,51%
3.	Pns	6	0,78%
4.	Tukang	8	1,04%
5.	Guru	7	0,91%
6.	Tni/Polri	1	0,13%
7.	pensiun	3	0,39%
8.	Sopir/Angkutan	2	0,26%
9.	Buruh	4	0,52%
10.	Swasta	245	31,82%
11.	Peternak	89	11,56%
jumlah		770	100%

Sumber: Olahan data penelitian tahun 2026

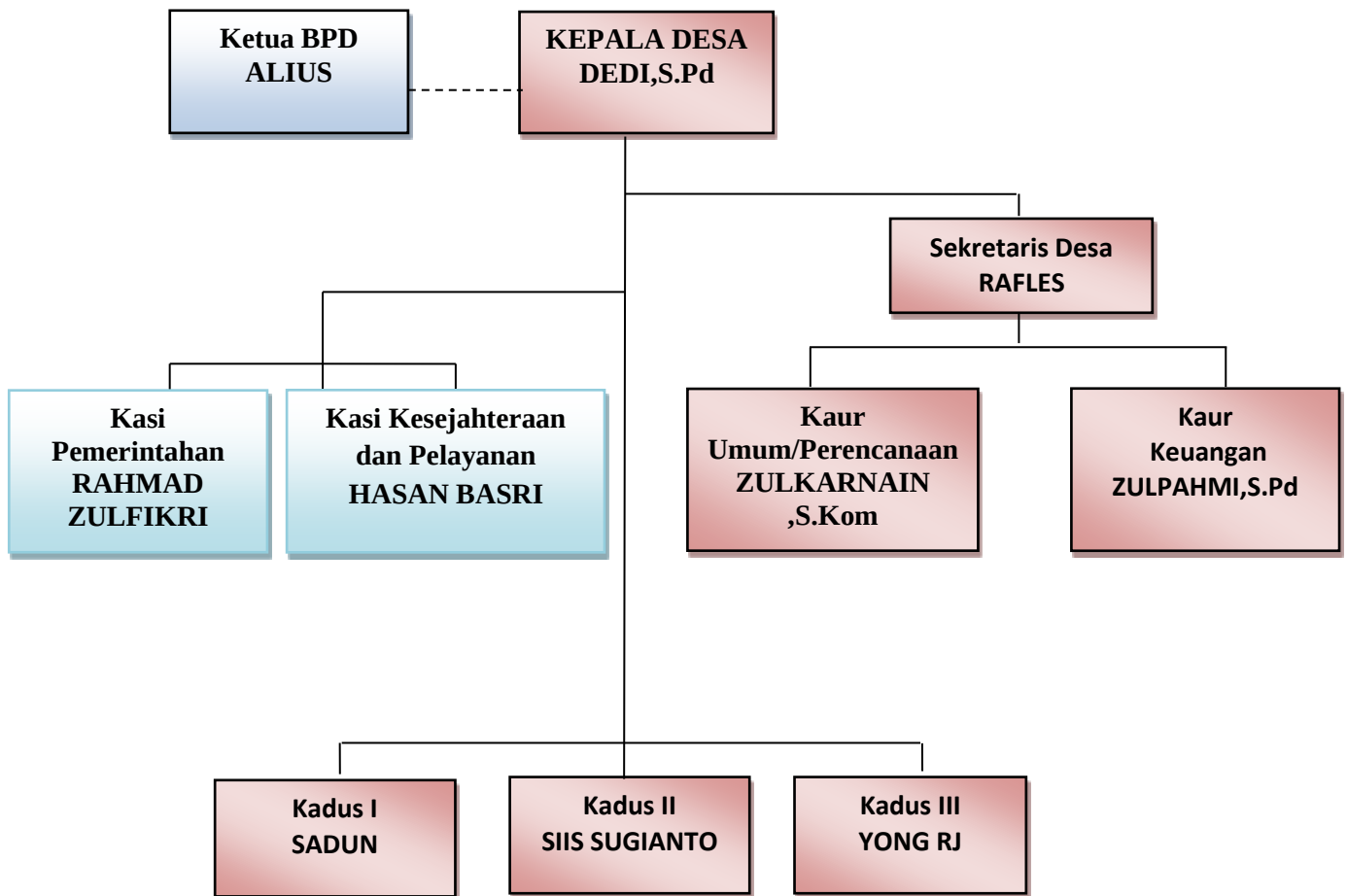
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Rawang Oguang adalah petani karet dengan persentase 49,09% dan selanjutnya yaitu swasta dengan jumlah persentase 31,82%.

4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Oguang

Berdasarkan peraturan yang terkait dengan desa yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang membantunya dalam menjalankan roda

pemerintahan desa. adapun struktur organisasi pemerintahan desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang



Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang Tahun 2026

Dalam melaksanakan tugas nya Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Kepala desa mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga memiliki wewenang, baik, kewajiban dan larangan sesuai dengan Undang-Undang yang ada.
2. Perangkat desa memiliki tugas dan fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada kepala desa, selain itu perangkat desa juga memiliki larangan yang harus dipatuhi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

6.2 Saran

1. Diharapkan agar Kepala Desa dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Rawang Oguang guna mendapatkan pembangunan-pembangunan sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desanya.
2. Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program pembangunan yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonius, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v22i2.1236>
- Castillo, V. S. (2023). The contribution of rural social networks to the consolidation of social capital. *Awari*, 4. <https://doi.org/10.47909/awari.52>
- Dewi, E. P. (2018). *GOOD GOVERNANCE*. 7(2), 81–108.
- Ermaya, B. S. (2016). Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Litigasi*, 16(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>
- Faried, A. (2015). *teori konsep administrasi dari pemikiran pradigma menuju redefenisi*.
- Hastuty, E. (2021).). *Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hukum, F., & Suryadarma, U. (2018). *Pemerintahan desa*. 7(1), 82–95.
- Isdairi. (2021). *Sosiologi masyarakat modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Juharni. (2015). *Administrasi negara dan kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
<https://doi.org/10.55606/jass.v2i1.1023>
- Moleong. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2019). *pengantar ilmu administrasi negara*. unimal press.
- Muhammad, W. dalam. (2019). *Administrasi dan birokrasi pemerintahan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2018). *Administrasi Publik dalam Perspektif Kontemporer*. Gadjah Mada University Press.
- Ndraha. (2008). *Kebijakan publik dan pemerintahan desa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Putu, N., & Widanti, T. (2022). *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur*. 3(1), 73–85.
- Sahya, A. (2016). *ilmu administrasi negara*. CV. Pustakan Setia.
- Suparmoko. (2008). *Ekonomi publik untuk pembangunan daerah dan desa*.

Yogyakarta: BPFE.

Syafiie, I. (2019). Dasar-dasar ilmu administrasi negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Yulianti. (2022). *Pengantar sosiologi masyarakat dan budaya*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Robertho Puay, Yohanes G.T Helan, & Cyrilius W. T. Lamataro. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 49–57. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1247>

B. Jurnal

Fahmi, I., Suryana, I., & Ramadhan, A. (2020).). Pembangunan partisipatif dalam tata kelola desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.

Haeranah, H. (2024). Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang Efektif. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 176–186. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4746>

M. Harry Mulya Zein, & Sisca Septiani. (2021). Manajemen Partisipatif: Sebuah Pendekatan Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Administrative and Social Science*, 2(1), 01–15. <https://doi.org/10.55606/jass.v2i1.1023>

Nurhayati Harahap, Lely Mawaddah, Rafika Amalia Lubis, & Adil Alfarizi nasution. (2023). Penerapan Manajemen Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Aspek Perencanaan Pembangunan Nasional. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 123–137. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2299>

Purba, S. D. W. Y., Kartika, I., Sitanggang, D. C., Saragih, J. P., Herdiansyah, H. A., Sitorus, N., & Ivanna, J. (2023). Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Efektif Terhadap Pembangunan. *Journal of Law & Policy Review*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.34007/jlpr.v1i1.65>

Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>

Sembel, R., Yani, R., & Tumengkol, M. (2017).). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berbasis otonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*.

Suhaeb, F. W., & Kaseng, E. S. (2023). Contribution of the Role of Social Capital in the Development of Rural Communities. *Social Landscape Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.56680/slaj.v4i1.43905>

Yahya, T., & Yahya, S. (2020). Social Characteristics and Differences of Urban and Rural Communities. *Journal La Sociale*, 1(5), 24–27. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i5.204>

LAMPIRAN

 19/4-2020. P. I. L.
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa rawang oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Miranda Meira Yola
NPM	: 220411048
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

**D. Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa rawang
oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan
Singingi.**

I. Partisipasi dalam Perencanaan

1. Bagaimana keterlibatan dalam memberikan ide dan saran pada
musyawarah pembangunan desa, khususnya dalam menyampaikan
usulan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimana peran dalam proses perencanaan program pembangunan desa,
terutama dalam menentukan kegiatan dan prioritas pembangunan?

Berikan Ulasan

.....
.....

II. Partisipasi dalam Pelaksanaan

1. Bagaimana bentuk partisipasi dalam memberikan sumbangan tenaga
pada pelaksanaan pembangunan desa, baik secara langsung maupun tidak
langsung?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimana keterlibatan dalam merawat dan menjaga hasil pembangunan
desa agar tetap bermanfaat secara berkelanjutan?

Berikan Ulasan

.....
.....

III. Partisipasi dalam Pengawasan

1. Bagaimana tingkat keaktifan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa guna memastikan kesesuaian dengan rencana?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana tingkat keaktifan dalam memantau penggunaan keuangan desa terkait transparansi dan akuntabilitas?

Berikan Ulasan

.....

IV. Partisipasi dalam evaluasi

1. Bagaimana keterlibatan dalam kegiatan evaluasi pembangunan desa, khususnya dalam menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana cara memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan desa, terutama terkait manfaat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat?

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa rawang oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur masyarakat Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Miranda Meira Yola
NPM	: 220411048
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

**D. Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa rawang
oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan
Singingi.**

1. Partisipasi dalam Perencanaan

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah memberikan ide atau saran dalam musyawarah tersebut?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam merencanakan program pembangunan desa?

Berikan Ulasan

.....
.....

II. Partisipasi dalam Pelaksanaan

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i ikut serta dalam merawat hasil pembangunan desa?

Berikan Ulasan

.....
.....

III. Partisipasi dalam Pengawasan

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i ikut serta dalam memantau pelaksanaan pembangunan desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui dan ikut memantau penggunaan keuangan desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

IV. Partisipasi dalam evaluasi

1. Apakah pendapat atau masukan masyarakat diperhatikan dalam evaluasi pembangunan?

Berikan Ulasan

.....

.....

2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan desa?

Berikan Ulasan

.....

.....

**Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
Kabupaten Kuantan Singingi**



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Ketua BPD



Wawancara dengan Kaur Pembangunan



Wawancara dengan Tokoh Adat



Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawanacra dengan Tokoh Pemuda



Wawancara dengan Tokoh Perempuan



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 093/Kpts FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
 - b. Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Miranda Meira Yola
 NPM : 220411048
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Otonomi Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
 Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
 NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KEPALA DESA RAWANG OGUANG**

Jl. Perkebunan No....Desa Rawang Oguang, Kode Pos 29561

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 03/SKIP/RO/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: MIRANDA MEIRA YOLA
NPM	: 220411048
Jurusan/Progam Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Nama tersebut benar telah melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang berlokasi di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul penelitian **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang”**.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rawang Oguang
Pada Tanggal : 06 Mei 2026
Kepala Desa Rawang Oguang


DEDI, S. Pd



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MIRANDA MEIRA YOLA

NPM : 220411048

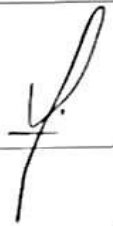
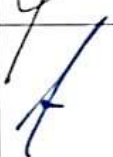
DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. DESRIADI, Sos., M.Si

2. SARJAN M, S.Sos., M.Si

JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
 PEMBANGUNAN DI DESA RAWANG OGUANG
 KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG

Mulai Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	16/11-2024	Pembiki cover proje latar Beladg		f.	
	26/11-2024	Rapikan paraf		f.	
	27/11-2024	Tambahkan Teori yg Relevan		f.	
		Agan kebutuhan penelitian			

		pusatkan Foto Sesuai Sampul dan pupa puli.			
		Perbaiki yay di Court 2			
		Atas Pula Rapih.			
		Aa. Atk di Gi			
	93/ 1-26	Tubelen Pemas			
	15/ 1-26	Proses di Pula - teori Abulh			
		Ufenthorc Pexia			



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MIRANDA MEIRA YOLA

NPM : 220411048

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. DESRIADI, Sos., M.Si

2. SARJAN M, S.Sos., M.Si

JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
 PEMBANGUNAN DI DESA RAWANG OGUANG
 KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG

Mulai Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	16/11-2024	Perbaiki cover prinsip latar belakang			
	26/11-2024	Rapikan paragraf			
	27/11-2024	Tambahkan Teori yg relevan			
		Bagan kelengkapan penelitian			

		pusatkan teori sesuai Sampul dan papak puli.			
		Perbaiki yang di Court 2			
		Atas Pula Rapha.			
		Aa. aka di gi			
	93/ 1-26	Tubelen Penda 1			
	15/ 1-26	Provisi & Prob. 1 - teori & praktik			
		Uraian Pexia			



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Miranda Meira Yola

NPM : 220411048

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di desa Rawang
 Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 12 Februari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Miranda Meira Yola**

NPM : 220411048

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Hari/Tgl Ujian : Rabu / 29 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Miranda Meira Yola
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Sorik/04 April 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Kawin
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hiliar Seberang
 Alamat Email : Mirandameirayola@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2010 LULUS TK Babussalam Rawang Oguang
 2. Tahun 2016 LULUS SD N 006 Sungai Sorik
 3. Tahun 2019 LULUS SMP N 2 Pulau Kulur
 4. Tahun 2022 LULUS SMA N1 Kuantan Hilir Seberang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 30 April 2026

Penulis

MIRANDA MEIRA YOLA
NPM.22041048